



**LAPORAN KINERJA
(LKj) DPMPSTP
TRIWULAN IV
TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Veteran No.72 Lumajang
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444
L U M A J A N G - 67316

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam menjalankan segala aktifitasnya agar dapat dinilai kinerjanya dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang harus dicapai.

LKj ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari sempurna, mengingat latar belakang personil dan pendidikan yang beragam, pengalaman kerja yang masih minim serta kemampuan dalam memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang masih belum optimal. Oleh sebab itu saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.....	1
1. Dasar Hukum penetapan SKPD	1
2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang	3
B. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>).....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Tujuan.....	12
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025	26
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya.....	38
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra PD Tahun 2025-2029	41
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standart Provinsi.....	42
5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	43
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	47
B. Realisasi Anggaran	49
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	53
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

1. Dasar Hukum penetapan SKPD

Cikal bakal berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai peningkatan status Kantor menjadi Dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu, kemudian di kuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal.

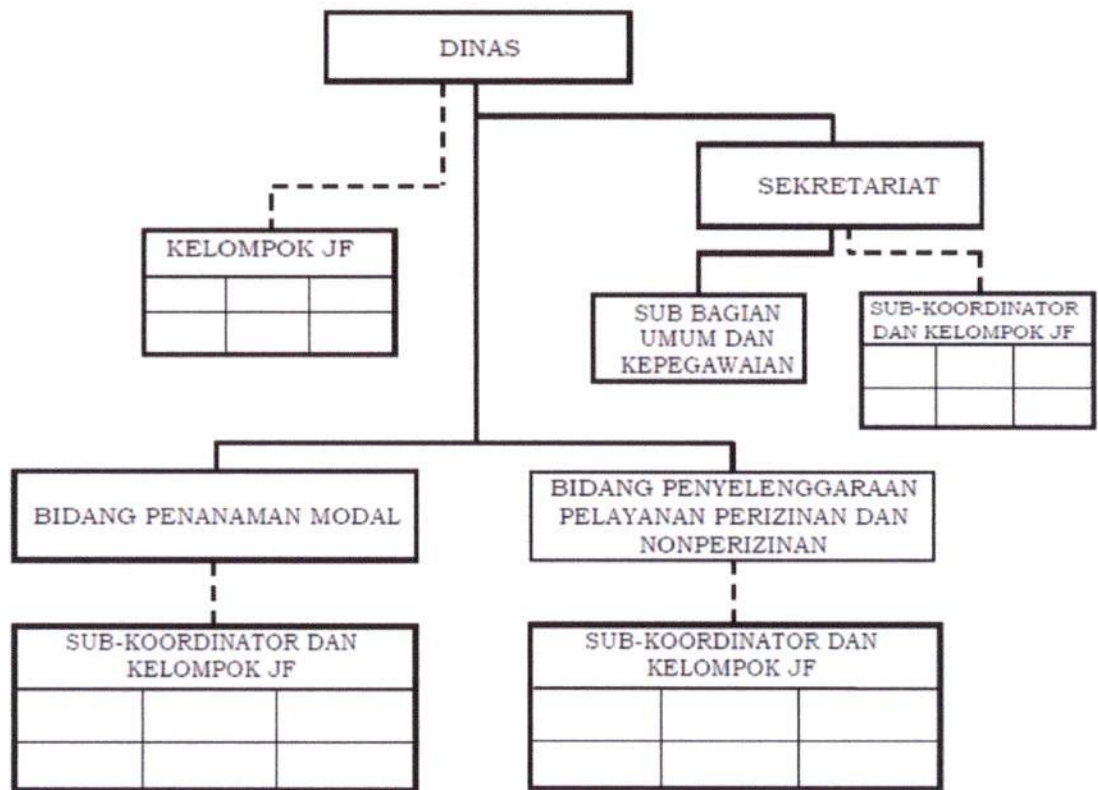
Adapun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

Dalam ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan sasaran organisasi mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran program dalam bentuk kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya sebagai berikut:

3.1. Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DPMPTSP 2025

Klasifikasi			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
A	Status Kepegawaian				
-	PNS	:	11	5	16
-	P3K	:	4	16	20
-	Jumlah Pegawai	:	15	21	36
B	Pendidikan PNS				
-	Magister (S2)	:	3	0	3
-	Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)	:	4	4	8
-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	0	0	0
-	SLTA	:	3	1	4
-	SLTP	:	1	0	1
C	Pendidikan P3K				
-	Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)	:	3	9	12
-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	0	1	1
-	SLTA	:	1	6	7
D	Pangkat dan Golongan				
-	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	0	1
-	Pembina (IV/a)	:	2	1	3
-	Penata Tingkat I (III/d)	:	2	1	3
-	Penata (III/c)	:	1	0	1
-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	1	0	1
-	Penata Muda (III/a)	:	1	1	2
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	2	1	3
-	Pengatur (II/c)	:	0	0	0
-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	0	0	0
-	Pengatur Muda (II/a)	:	1	0	1
-	Juru Tingkat I (I/d)	:	1	0	1
E	Jabatan Struktural				
-	Eelon II	:	1	0	1
-	Eselon III	:	1	1	2
-	Eselon IV	:	1	0	1
F	Jabatan Fungsional				
-	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	:	2	1	3

Klasifikasi			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
	-	Fungsional Penata Perizinan	:	1	2	3
	-	Fungsional Pranata Komputer	:	1	0	1
G		Pelaksana	:	6	1	7

3.2. Asset dan Modal

Daftar Peralatan Penunjang Operasional Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah:

Tabel 1.2 Daftar Aset DPMPTSP

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1	Tanah	M ²	1	3500 M ²
2	Pompa Air	Unit	1	Rusak Ringan
3	Portable Generating Set	Unit	2	- Baik= 1 - Rusak Ringan= 1
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan/Mobil dinas	Unit	5	- Baik= 2 - Rusak Ringan= 3
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua /sepeda motor	Unit	7	- Baik = 2 - Rusak Ringan= 5
6	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya/ gerobak Sampah	Unit	1	Rusak Ringan
7	GPS.60	Unit	2	Rusak Ringan
8	Alat Ukur Measuring Wheel	Unit	1	Rusak Ringan
9	Almari	Unit	23	Rusak Ringan
10	Mesin Ketik	Unit	2	- Rusak Berat = 1 - Rusak Ringan = 1
11	Brangkas	Unit	2	Baik
12	Lemari ES	Unit	1	Baik
13	Rak Besi	Buah	11	Rusak Ringan
14	Televisi / TV	Unit	6	Baik
15	AC Split	Unit	39	- Rusak Berat= 11 - Baik= 28
16	Meja	Unit	61	Baik
17	kursi	buah	70	Baik
18	UPS	Unit	21	Baik
19	APAR / Alat Pemdam Kebakaran	buah	7	Baik
20	Tape Recorder	Unit	1	Rusak Ringan
21	DVD Player	Unit	1	Rusak Ringan
22	Sound Sistem Aktif	Unit	3	- Rusak Berat= 1 - Rusak Ringan= 2
23	Rak Piring	buah	1	Baik

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
24	Play Ground	set	1	Rusak Ringan
25	Mesin Penghancur Kertas	Unit	3	- Rusak Berat= 1 - Baik= 2
26	Gorden Ruangan	Buah	14	- Rusak Berat= 2 - Baik= 12
27	Water Dispenser	Unit	3	Rusak Ringan
28	Camera	Unit	2	Rusak Ringan
29	Pylon (papan Nama)	buah	1	Baik
30	Partisi Pelayanan MPP	buah	1	Baik
31	Charging Station	set	1	Baik
32	Sekat Pelindung Meja Layanan	Buah	8	Rusak Ringan
33	Papan Informasi	Unit	1	Rusak Berat
34	Tangga Alumunium	Unit	1	Baik
35	Bak Penampungan Air	Unit	1	Baik
36	LCD Proyektor	Unit	1	Baik
37	Handy Cam	Unit	1	Rusak Berat
38	Alat Pemotong Kertas	Unit	2	Rusak Ringan
39	SCANNING BARCODE	Unit	1	Rusak Ringan
40	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	Rusak Berat
41	Mesin Laminating	Unit	1	Baik
42	Mobile Drawer untuk Meja Layanan	Unit	4	Rusak Ringan
43	Partisi Pendek tepi Meja Layanan	Unit	2	Rusak Ringan
44	Letter 'Kantor Pelayanan Terpadu' & Letter ' Kabupaten Lumajang'	Unit	1	Rusak Ringan
45	Casing Mesin Antrian	Unit	1	Rusak Ringan
46	Casing Layanan Info Mandiri	Unit	1	Rusak Ringan
47	Mesin Antrian Counter Display (Screen)	Unit	8	Rusak Ringan
48	Logo KPT	Set	1	Rusak Berat
49	Mesin Fotocopy	Unit	3	Rusak Ringan
50	Conference Cam dan speakerphone dan remote kontrol	Unit	1	Baik
51	TOA Sound Porteble dan Mic wireless	Unit	1	Rusak Ringan
52	Telepon PABX	Unit	12	- Rusak Ringan= 1 - Rusak Berat= 11
53	Faximile	Unit	1	Rusak Ringan
54	Layar/Screen	Unit	1	Rusak Ringan
55	Mesin Laminating	Unit	1	Rusak Berat
56	Neon Box	unit	1	Rusak Berat
57	Mesin Informasi Electronic LED Displays	unit	1	Rusak Berat
58	Mesin Antrian Sound Amplifire TOA	unit	1	Rusak Berat

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
59	Letter Dinas	Unit	1	Rusak Ringan
60	Projektor	Unit	1	Rusak Ringan
61	Braket Projektor	Unit	1	Rusak Ringan
62	white Screen Automatic	Unit	1	Rusak Ringan
63	Laser Pointer	Unit	1	Rusak Ringan
64	Karpet lantai	Unit	1	Baik
65	Tablet 8 inch	Unit	1	Baik
66	HP/ hand phone	Unit	2	Baik
67	Kursi Roda	Unit	1	Rusak Ringan
68	Personal Komputer	Unit	42	- Rusak Berat= 8 - Rusak Ringan= 31 - Baik = 3
69	Laptop	Unit	10	- Rusak Berat= 5 - Rusak Ringan= 4 - Baik= 1
70	Printer	Unit	44	- Rusak Berat= 17 - Rusak Ringan= 27
71	Modem Wi Fi	Unit	3	- Rusak Berat= 2 - Baik= 1
72	Scanner	Unit	10	- Rusak Ringan= 6 - Baik= 4
73	Acces Point	Unit	4	Rusak Ringan
74	Switch	Unit	4	Rusak Ringan
75	Hard disk eksternal	Unit	1	Rusak Ringan
76	Kabel HDMI 15	Unit	4	Rusak Ringan
77	Monitor (ID)	Unit	2	Rusak Ringan
78	Server	Unit	4	Rusak Ringan
79	Router	Unit	3	Rusak Ringan
80	instalasi jaringan	Unit	1	Rusak Ringan
81	Mesin Antrian Printer	Unit	1	Rusak Ringan
82	Papan Petunjuk Arah	Unit	2	Baik
83	Gedung dan Bangunan	Unit	7	Rusak Ringan
TOTAL			506	- Baik = 240 - Rusak Ringan = 199 - Rusak Berat = 67

B. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang pada RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah Permasalahan Ekonomi. Dari permasalahan tersebut dapat dijabarkan Isu Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Isu Strategis DPMPTSP

NO	MASALAH	Isu Strategis
1	Belum optimalnya identifikasi dan Pemasaran Potensi Investasi Daerah	Kuranginya minat penanam modal dalam menanamkan modal di Kabupaten Lumajang
2	Kuranginya promosi investasi (mengikuti pameran, pelaksanaan business meeting, dll)	
3	Kuranginya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kuranginya Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas penyelenggaraan pelayanan di sektor penanaman modal

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal. Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Gambar 1.2 yang selaras dengan masalah pokok yang dihadapi oleh DPMPTSP.

Konsep Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

- Level 0 : Indikator : Persentase Pertumbuhan Ekonomi (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 halaman 25)
 Fenomena : Persentase pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut dari tahun

2017 yaitu 5,05% menjadi 4,61% ditahun 2019, dan bahkan mencapai -2,79% di tahun 2020. Pada tahun 2021 kondisi meningkat 3,14% namun belum mampu mencapai angka pada tahun 2019 (BPS Kab. Lumajang 2021)

2. Level 1 : Indikator : Nilai Investasi (Lampiran Perka BKPM Nomor 2 Tahun 2020 halaman 28)

Fenomena : Masih rendahnya nilai investasi di Kabupaten Lumajang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur, dimana persentase dukungan terhadap capaian investasi di Provinsi Jawa Timur hanya sebesar 0,3% (release data realisasi investasi DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur)

3. Level 2 : - Indikator 1 : Nilai Investasi PMA (Lampiran Perka BKPM Nomor 2 Tahun 2020 halaman 28)

Fenomena : Rendahnya penanaman modal asing di Kabupaten Lumajang dimana realisasi PMA pada tahun 2021 senilai 1,3 Miliar menurun 600 Juta dibanding tahun 2020 dengan nilai capaian 1,9 Miliar (Data NSWI BKPM 2021) menunjukkan belum optimalnya strategi promosi dan rendahnya iklim investasi

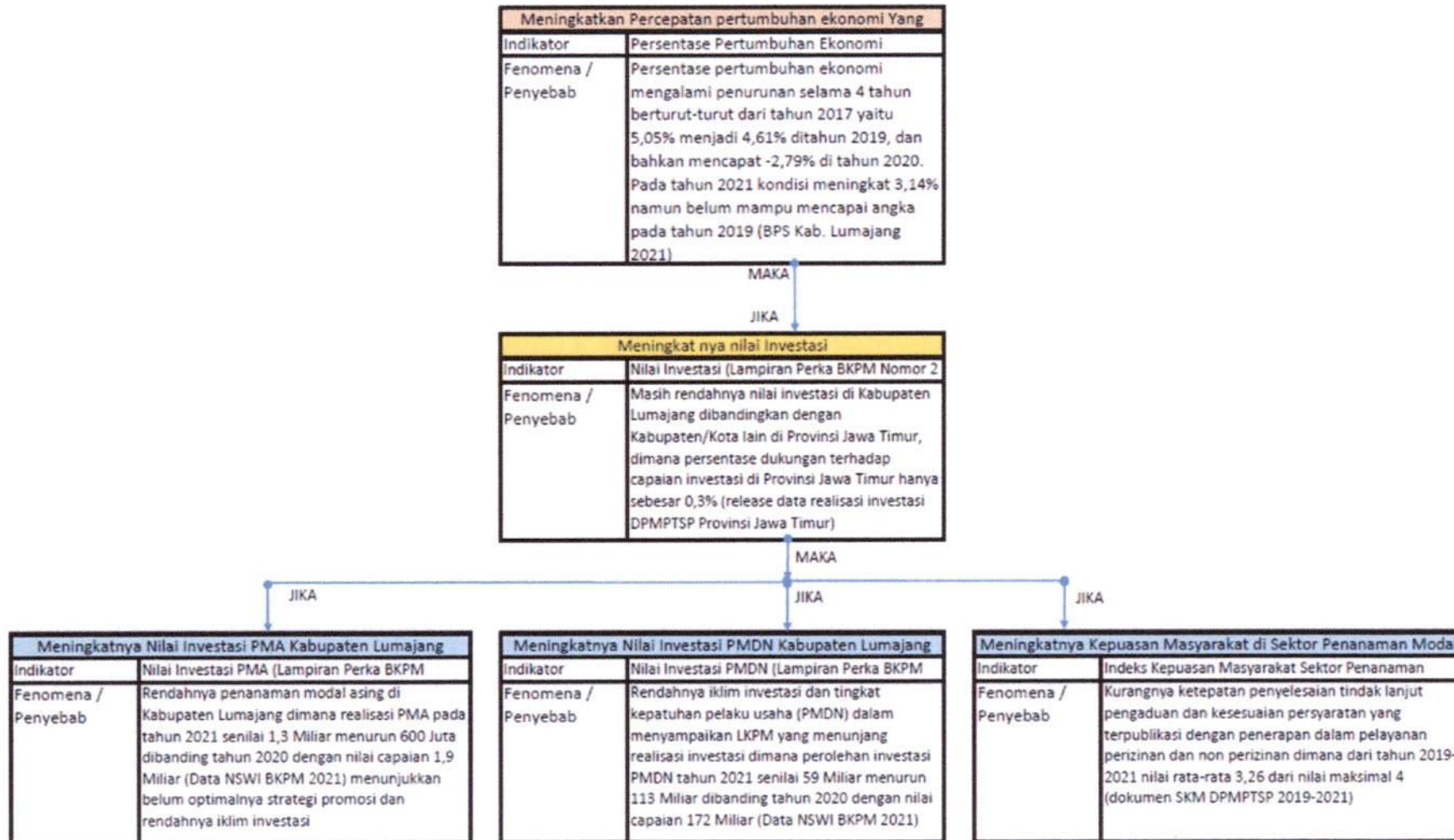
- Indikator 2 : Nilai Investasi PMDN (Lampiran Perka BKPM Nomor 2 Tahun 2020 halaman 28)

Fenomena : Rendahnya iklim investasi dan tingkat kepatuhan pelaku usaha

(PMDN) dalam menyampaikan LKPM yang menunjang realisasi investasi dimana perolehan investasi PMDN tahun 2021 senilai 59 Miliar menurun 113 Miliar dibanding tahun 2020 dengan nilai capaian 172 Miliar (Data NSWI BKPM 2021)

- Indikator 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 1)

Fenomena : Kurangnya ketepatan penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan kesesuaian persyaratan yang terpublikasi dengan penerapan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dimana dari tahun 2019-2021 nilai rata-rata 3,26 dari nilai maksimal 4 (dokumen SKM DPMPTSP 2019-2021)



Gambar 1.2 Pohon Kinerja DPMPTSP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan yang tertuang pada Renstra PD yang selaras dengan RPJMD, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2025-2029 adalah **“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”** sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan DPMPTSP

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Renja 2025
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	10 Persen

Untuk mendapatkan peningkatan investasi tersebut digunakan rumus Realisasi Investasi tahun n dikurangi Realisasi Investasi tahun $n-1$ dibagi Realisasi Investasi tahun $n-1$ dikali 100 Persen, dimana Realisasi Investasi didapat dari hasil penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

B. Perjanjian Kinerja

Tujuan perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah dibuat untuk melaksanakan program, sasaran dan kegiatan pada Tahun 2025 menjadi tumpuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Perjanjian Kinerja ini merupakan janji kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang pada Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2025 dan Tabel 2.3 Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 dibawah ini.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	0,146 Triliun Rupiah
2.	Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	2,495 Triliun Rupiah
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

1. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari hasil penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online*.
2. Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapat dari hasil penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online*.
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada Semester I dan Semester II.

Tabel 2.3 Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program 1 : Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100 Persen	127.070.750,48
	Kegiatan 1.1 : Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	10 Persen	14.751.750
	Sub Kegiatan 1.1.03 : Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	11.046.250
	Sub Kegiatan 1.1.04 : Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	3.705.500
	Kegiatan 1.2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun	Persentase Peta Potensi yang disusun	17 Persen	112.319.000,48
	Sub Kegiatan 1.2.01 : Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.870.000

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Sub Kegiatan 1.2.04 : Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	86.449.000,48
2.	Program 2 : Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	15,54 Persen	44.648.000
	Kegiatan 2.1 : Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	83 Pelaku Usaha	44.648.000
	Sub Kegiatan 2.1.02 : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44.648.000
3.	Program 3 : Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	1 Persen	351.841.792
	Kegiatan 3.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	24.193 Izin	351.841.792
		Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	1.651 Non Izin	
	Sub Kegiatan 3.1.05 : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang	2 Dokumen	1.350.000

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan 3.1.06 : Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	21.602 Pelaku Usaha	311.611.792
	Sub Kegiatan 3.1.07 : Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	140 Pelaku Usaha	7.200.000
	Sub Kegiatan 3.1.08 : Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	31.680.000
4.	Program 4 : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	58 Persen	103.763.250
	Kegiatan 4.1 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	200 Kegiatan Usaha	103.763.250

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Lumajang			
	Sub Kegiatan 4.1.04 : Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	200 Kegiatan Usaha	11.098.750
	Sub Kegiatan 4.1.05 : Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	59.850.000
	Sub Kegiatan 4.1.06 : Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	32.814.500
5.	Program 5 : Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	3.812.046.138,10
	Kegiatan 5.1 : Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	9.835.000

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Sub Kegiatan 5.1.01 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.869.750
	Sub Kegiatan 5.1.02 : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	851.000
	Sub Kegiatan 5.1.03 : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	844.250
	Sub Kegiatan 5.1.06 : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300.000
	Sub Kegiatan 5.1.07 : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	4.970.000
	Kegiatan 5.2 : Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.781.915.436
	Sub Kegiatan 5.2.01 : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.723.413.436

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Sub Kegiatan 5.2.02 : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	57.102.000
	Sub Kegiatan 5.2.05 : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.075.000
	Sub Kegiatan 5.2.07 : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	325.000
	Kegiatan 5.3 : Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	755.000
	Sub Kegiatan 5.3.01 : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	130.000
	Sub Kegiatan 5.3.06 : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	625.000
	Kegiatan 5.4 : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 Persen	22.670.000

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Sub Kegiatan 5.4.09 : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	22.670.000
	Kegiatan 5.5 : Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	133.426.268
	Sub Kegiatan 5.5.01 : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	1 Paket	6.403.701
	Sub Kegiatan 5.5.04 : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	54.983.875
	Sub Kegiatan 5.5.05 : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.318.492
	Sub Kegiatan 5.5.06 : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	400.000
	Sub Kegiatan 5.5.07 : Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	13.736.200
	Sub Kegiatan 5.5.08 : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.300.000
	Sub Kegiatan 5.5.09 : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	46.284.000

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Kegiatan 5.6 : Terpenuhiya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	222.116.146
	Sub Kegiatan 5.6.06 : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	222.116.146
	Kegiatan 5.7 : Terpenuhiya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	352.844.320
	Sub Kegiatan 5.7.01 : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	662.500
	Sub Kegiatan 5.7.02 : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.970.000
	Sub Kegiatan 5.7.04 : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	202.211.820
	Kegiatan 5.8 : Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	288.483.968,10
	Sub Kegiatan 5.8.02 : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	109.314.201
	Sub Kegiatan 5.8.06 : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	35.499.765,56

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Lainnya			
	Sub Kegiatan 5.8.09 : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	143.670.001,54

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal (Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

$91\% \leq 100\%$: Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$: Tinggi
$66\% \leq 75\%$: Sedang
$51\% \leq 65\%$: Rendah
$\leq 50\%$: Sangat Rendah

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang 2025-2029. Pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan Tahun 2025. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian rata-rata 74,22% dengan kategori Sedang.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi s/d TW IV	Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
	Tujuan								
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	0	0	0	10 Persen	10 Persen	-6,57 Persen	-66%
	Sasaran								
1	Meningkatnya Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	0,002 Triliun Rupiah	0,006 Triliun Rupiah	0,043 Triliun Rupiah	0,095 Triliun Rupiah	0,146 Triliun Rupiah	0,049 Triliun Rupiah	34%
2	Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	0,993 Triliun Rupiah	0,623 Triliun Rupiah	0,462 Triliun Rupiah	0,417 Triliun Rupiah	2,495 Triliun Rupiah	2,193 Triliun Rupiah	88%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	-	86	-	86	86	87,04	101%

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari Penyampaian LKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar -6,57 Persen dengan capaian kinerja -6,57%.

- **Sasaran Strategis :**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 1 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Dari data capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang yang disajikan pada Tabel 3.1 diatas untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya, adapun capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 serta capaian program dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Triwulan IV Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	10 Persen	-6,57 Persen	-6,57%

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari NSWI BKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	0,146 Triliun Rupiah	0,049 Triliun Rupiah	34%
Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	2,495 Triliun Rupiah	2,193 Triliun Rupiah	88%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86	87,04	101%

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari NSWI BKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

Pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 disajikan data perbandingan target capaian kinerja dan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Dimana capaian kinerja dari 3 sasaran terdapat 1 sasaran yang telah memenuhi target yang ditentukan dan 2 sasaran belum tercapai sesuai target yang ditentukan dengan rata-rata capaian 74,22%, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Investasi PMA

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Investasi PMA yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 0,146 (Triliun Rupiah), terealisasi sebesar 0,049 (Triliun Rupiah) dengan capaian 34 % atau tergolong capaian kerjanya **sangat rendah**.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 0,049 (Triliun Rupiah) terdapat penambahan 0,037 (Triliun Rupiah) pada Triwulan III, nilai tersebut berasal dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sampai dengan periode Triwulan IV (**rekap manual penyampaian LKPM mulai tanggal 1-6 Januari 2026**). Namun nilai tersebut dapat berubah mengingat batas waktu penyampaian LKPM periode Triwulan IV sampai dengan tanggal **10 Januari 2026**.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Investasi PMDN

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Investasi PMDN yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 2,495 (Triliun Rupiah), terealisasi sebesar 2,193 (Triliun Rupiah) dengan capaian 88 % atau tergolong capaian kinerjanya **Tinggi**.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2,193 (Triliun Rupiah) terdapat penambahan 0,309 (Triliun Rupiah) pada Triwulan III, nilai tersebut berasal dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sampai dengan periode Triwulan IV (**rekap manual penyampaian LKPM mulai tanggal 1-6 Januari 2026**). Sehingga nilai tersebut dapat berubah mengingat batas waktu penyampaian LKPM periode Triwulan IV sampai dengan tanggal **10 Januari 2026**.

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal

Sasaran staregis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 86 (Angka), sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar 87,04 (Angka) dengan capaian 101 % atau tergolong capaian kinerjanya **Sangat Tinggi**.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I ditambah Nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II dibagi 2, nilai IKM tersebut didapat dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Sedangkan pada indikator tujuan capaian target -6,57% dari target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja tersebut

masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu peningkatan 10% dari tahun sebelumnya, dimana realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebesar 2,242 Triliun Rupiah dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 2,4 Triliun Rupiah.

Selanjutnya pada Tabel 3.4 disajikan capaian realisasi target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung atas tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tabel 3.3 tersebut. Pada Tabel 3.4 tersebut terdapat 3 Sasaran Program dari 5 Sasaran yang telah mencapai target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan pada Sasaran Kegiatan terdapat 9 Sasaran Kegiatan yang telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dari 13 Sasaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Pada Sasaran Sub Kegiatan dari 38 Sasaran telah mencapai target sejumlah 27 Sasaran Sub Kegiatan.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1.	Program 1 : Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100 Persen	127.070.750,48	85 Persen	112.973.000	85,00%	88,91%
	Kegiatan 1.1 : Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	10 Persen	14.751.750	0 Persen	9.035.000	0,00%	61,25%
	Sub Kegiatan 1.1.03 : Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	11.046.250	1 Dokumen	9.035.000	100,00%	81,79%
	Sub Kegiatan 1.1.04 : Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	3.705.500	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan 1.2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun	Persentase Peta Potensi yang disusun	17 Persen	112.319.000,48	17 Persen	103.938.000	100,00%	92,54%
	Sub Kegiatan 1.2.01 : Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.870.000	0 Dokumen	21.600.000	0,00%	83,49%
	Sub Kegiatan 1.2.04 : Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	86.449.000,48	1 Dokumen	82.338.000	100,00%	95,24%

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.	Program 2 : Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	15,54 Persen	44.648.000	16,15 Persen	5.483.500	103,93%	12,28%
	Kegiatan 2.1 : Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	83 Pelaku Usaha	44.648.000	40 Pelaku Usaha	5.483.500	48,19%	12,28%
	Sub Kegiatan 2.1.02 : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44.648.000	1 Dokumen	5.483.500	50,00%	12,28%
3.	Program 3 : Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	1 Persen	351.841.792	-21 Persen	337.767.600	- 2100,00%	96,00%
	Kegiatan 3.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	24.193 Izin	351.841.792	16.881 Izin	337.767.600	69,78%	96,00%
		Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	1.651 Non Izin		1.471 Non Izin		89,10%	
	Sub Kegiatan 3.1.05 : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	-	50,00%	0,00%

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Sub Kegiatan 3.1.06 : Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	21.602 Pelaku Usaha	311.611.792	15.261 Pelaku Usaha	299.358.000	70,65%	96,07%
	Sub Kegiatan 3.1.07 : Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	140 Pelaku Usaha	7.200.000	118 Pelaku Usaha	6.729.600	84,29%	93,47%
	Sub Kegiatan 3.1.08 : Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	31.680.000	26 Kegiatan Usaha	31.680.000	65,00%	100,00%
4.	Program 4 : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	58 Persen	103.763.250	63 Persen	78.899.500	108,62%	76,04%
	Kegiatan 4.1 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	200 Kegiatan Usaha	103.763.250	162 Kegiatan Usaha	78.899.500	81,00%	76,04%

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Sub Kegiatan 4.1.04 : Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	200 Kegiatan Usaha	11.098.750	112 Kegiatan Usaha	7.395.000	56,00%	66,63%
	Sub Kegiatan 4.1.05 : Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Pengawasan Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	59.850.000	100 Pelaku Usaha	59.650.000	100,00%	99,67%
	Sub Kegiatan 4.1.06 : Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	32.814.500	72 Kegiatan Usaha	11.854.500	72,00%	36,13%
5.	Program 5 : Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	3.812.046.138,10	100 Persen	3.062.830.816	100,00%	80,35%
	Kegiatan 5.1 : Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	9.835.000	100 Persen	9.771.750	100,00%	99,36%
	Sub Kegiatan 5.1.01 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	2.869.750	3 Dokumen	2.852.500	100,00%	99,40%

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Daerah	Perangkat Daerah	Dokumen					
	Sub Kegiatan 5.1.02 : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	851.000	1 Dokumen	833.750	100,00%	97,97%
	Sub Kegiatan 5.1.03 : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	844.250	2 Dokumen	827.250	100,00%	97,99%
	Sub Kegiatan 5.1.06 : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300.000	5 Laporan	294.000	100,00%	98,00%
	Sub Kegiatan 5.1.07 : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	4.970.000	13 Laporan	4.964.250	100,00%	99,88%
	Kegiatan 5.2 : Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.781.915.436	100 Persen	2.182.430.443	100,00%	78,45%
	Sub Kegiatan 5.2.01 : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.723.413.436	20 Orang/bulan	2.131.820.443	100,00%	78,28%
	Sub Kegiatan 5.2.02 : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	57.102.000	12 Dokumen	49.230.000	100,00%	86,21%

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Sub Kegiatan 5.2.05 : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.075.000	1 Laporan	1.062.000	100,00%	98,79%
	Sub Kegiatan 5.2.07 : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	325.000	12 Laporan	318.000	100,00%	97,85%
	Kegiatan 5.3 : Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	755.000	100 Persen	741.750	100,00%	98,25%
	Sub Kegiatan 5.3.01 : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	130.000	2 Dokumen	123.750	100,00%	95,19%
	Sub Kegiatan 5.3.06 : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	625.000	12 Laporan	618.000	100,00%	98,88%
	Kegiatan 5.4 : Terpenuhiya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 Persen	22.670.000	100 Persen	-	100,00%	0,00%
	Sub Kegiatan 5.4.09 : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	22.670.000	17 Orang	-	38,64%	0,00%

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Kegiatan 5.5 : Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	133.426.268	100 Persen	106.558.769	100,00%	79,86%
	Sub Kegiatan 5.5.01 : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.403.701	1 Paket	6.219.200	100,00%	97,12%
	Sub Kegiatan 5.5.04 : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	54.983.875	5 Paket	49.511.531	83,33%	90,05%
	Sub Kegiatan 5.5.05 : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.318.492	1 Paket	3.005.325	100,00%	56,51%
	Sub Kegiatan 5.5.06 : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	400.000	12 Dokumen	375.000	100,00%	93,75%
	Sub Kegiatan 5.5.07 : Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	13.736.200	12 Paket	8.440.000	100,00%	61,44%
	Sub Kegiatan 5.5.08 : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.300.000	12 Laporan	2.499.500	100,00%	39,67%
	Sub Kegiatan 5.5.09 : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	46.284.000	12 Laporan	36.508.213	100,00%	78,88%
	Kegiatan 5.6 : Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	222.116.146	100 Persen	180.224.002	100,00%	81,14%
	Sub Kegiatan 5.6.06 : Tersedianya	Jumlah Unit Peralatan dan	16 Unit	222.116.146	16 Unit	180.224.002	100,00%	81,14%

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan						
	Kegiatan 5.7 : Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	352.844.320	100 Persen	310.801.510	100,00%	88,08%
	Sub Kegiatan 5.7.01 : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	662.500	12 Laporan	516.350	100,00%	77,94%
	Sub Kegiatan 5.7.02 : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.970.000	12 Laporan	110.196.021	100,00%	73,48%
	Sub Kegiatan 5.7.04 : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	202.211.820	12 Laporan	200.089.139	100,00%	98,95%
	Kegiatan 5.8 : Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	288.483.968,10	100 Persen	272.302.592	100,00%	94,39%
	Sub Kegiatan 5.8.02 : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	109.314.201	12 Unit	99.772.988	100,00%	91,27%
	Sub Kegiatan 5.8.06 : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	35.499.765,56	51 Unit	35.090.000	100,00%	98,85%
	Sub Kegiatan 5.8.09 : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	143.670.001,54	2 Unit	137.439.604	100,00%	95,66%

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari Penyampaian LKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Bertambah /Berkurang (%)
Tujuan				
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	97 Persen	-6,57 Persen	-107%
Sasaran				
Meningkatnya Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	0,132 Triliun Rupiah	0,049 Triliun Rupiah	-63%
Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	2,268 Triliun Rupiah	2,193 Triliun Rupiah	-3%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	85,47	87,04	2%

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari Penyampaian LKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

Capaian kinerja Tujuan belum menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dan dari 3 Sasaran Strategis Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 1 Sasaran yang telah menunjukkan peningkatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 diatas.

Turut disajikan pula perbandingan realisasi kinerja selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang ditunjukkan pada Tabel 3.6 dibawah ini.

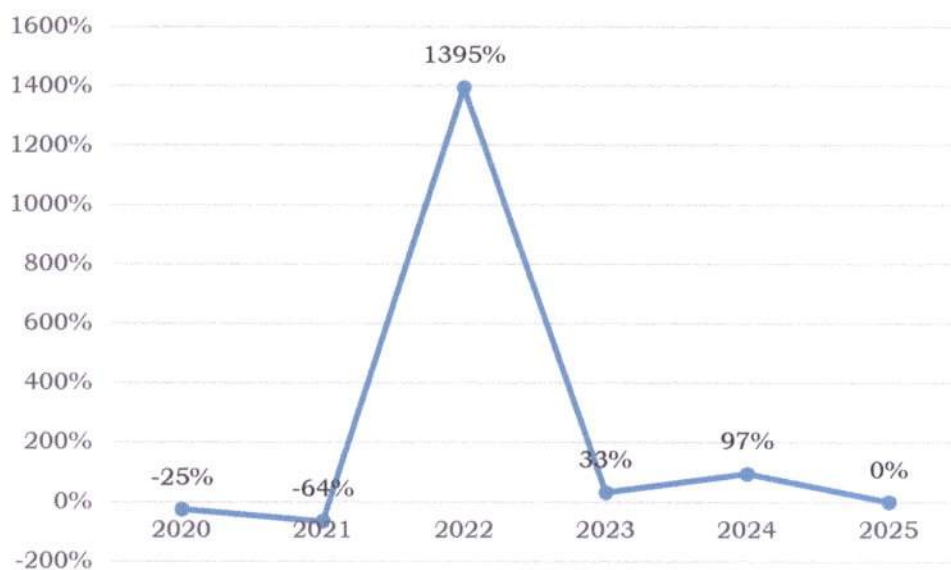
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun Ini dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tujuan							
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	-25 Persen	-64 Persen	1395 Persen	33 Persen	97 Persen	-6,57 Persen
Sasaran							
Meningkatnya Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	0,002 Triliun Rupiah	0,001 Triliun Rupiah	0,032 Triliun Rupiah	0,073 Triliun Rupiah	0,132 Triliun Rupiah	0,049 Triliun Rupiah
Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	0,172 Triliun Rupiah	0,060 Triliun Rupiah	0,885 Triliun Rupiah	1,146 Triliun Rupiah	2,268 Triliun Rupiah	2,193 Triliun Rupiah
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86,33	86,57	87,60	86,27	85,47	87,04

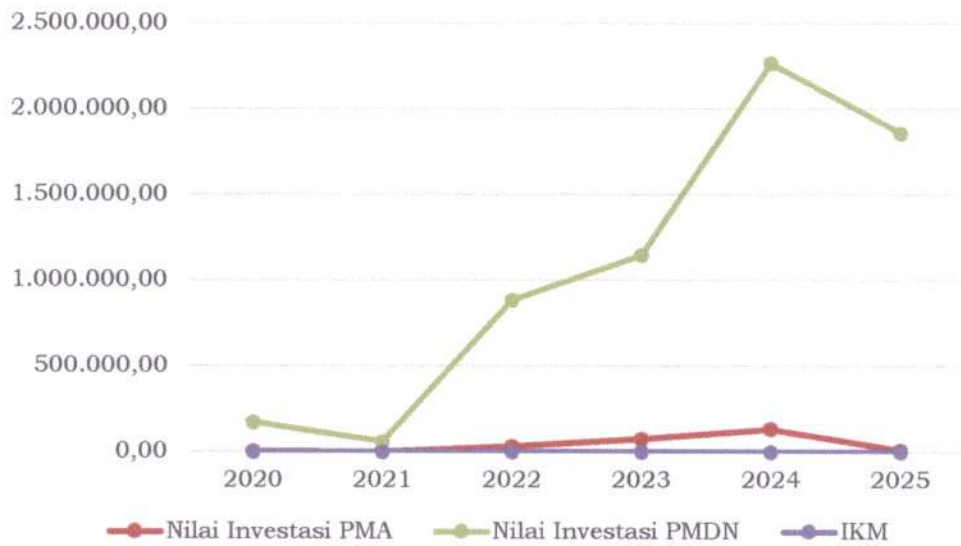
Sumber data : Rekapitulasi Manual dari Penyampaian LKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

Pada Tabel 3.6 pada realisasi kinerja Tujuan terdapat penurunan realisasi pada tahun 2020-2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 namun masih mengalami peningkatan dari realisasi investasi tahun sebelumnya dan meningkat kembali pada tahun 2024 yang cukup signifikan, pada periode Triwulan IV Tahun 2025 realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sampai dengan 2021 realisasi tersebut lebih tinggi. Pada 3 indikator kinerja sasaran secara rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024, namun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 2 Sasaran yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Gambaran Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun Ini dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.2.



Gambar 3.1 Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya



Gambar 3.2 Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra PD Tahun 2025-2029

Rencana kerja tahun 2025 merupakan gradasi dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan target Renstra PD Tahun 2025-2029 pada Tahun 2025. Perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025		
		Target Renstra	Realisasi	C
Tujuan				
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	10 Persen	-6,57 Persen	-66%
Sasaran				
Meningkatnya Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	0,146 Triliun Rupiah	0,049 Triliun Rupiah	34%
Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	2,495 Triliun Rupiah	2,193 Triliun Rupiah	88%
Meningkatnya Kepuasan	Indeks Kepuasan	86,0	87,04	101%

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025		
		Target Renstra	Realisasi	C
Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Masyarakat Sektor Penanaman Modal			

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari Penyampaian LKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

Pada Triwulan IV Tahun 2025 realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibandingkan dengan target capaian kinerja pada Renstra PD Tahun 2025-2029 pada target Tujuan belum mencapai target yang ditentukan dan pada target Sasaran terdapat 2 sasaran belum tercapai target yang ditentukan, diharapkan pada periode berikutnya capaian tersebut dapat segera tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standart Provinsi

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Capaian
Tujuan				
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	-6,57 Persen	-	-
Sasaran				
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	0,049 Triliun Rupiah	-	-
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	2,193 Triliun Rupiah	-	-
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,04	-	-

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari Penyampaian LKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.8 terlihat bahwa indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dikarenakan masih dalam proses perhitungan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, indikator tujuan Meningkatnya Investasi Inklusif kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Pada Triwulan IV Tahun 2025 Persentase Peningkatan Investasi berdasarkan realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN Tahun 2025 yang telah disampaikan pada aplikasi LKPM *Online* sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025 (rekapitulasi sampai dengan **6 Januari 2026**) dibandingkan dengan realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan tingkat capaian sebesar -6,57 Persen dari target yang ditetapkan sebesar 10 Persen.

Target kinerja tersebut belum tercapai disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi;
2. Belum memadainya kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal;
3. Belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM;

b. Sasaran Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Lumajang

Pada Triwulan IV Tahun 2025 realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN yang telah disampaikan pada aplikasi LKPM

Online sampai dengan periode Triwulan IV (rekapitulasi sampai dengan **6 Januari 2026**) belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan tingkat capaian Realisasi Investasi PMA sebesar 34% dari target dan capaian Realisasi Investasi PMDN sebesar 88%.

Target kinerja tersebut belum tercapai disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi;
2. Belum memadainya kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal;
3. Belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM;
4. Belum tersedianya SDM yang secara khusus menangani penyusunan kebijakan penanaman modal.

c. Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal

Pada Triwulan IV Tahun 2025 realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai target yang ditetapkan terealisasi sebesar 87,04 dari target 86 dengan tingkat capaian sebesar 101%.

Target kinerja tersebut telah tercapai ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
2. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (SIAP-SAJI);
3. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Target kinerja tersebut telah tercapai disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Enggannya responden dalam merespon tautan yang dikirimkan oleh petugas;

2. Tidak aktifnya nomor kontak responden yang telah dikirim tautan;
3. Ketidakpercayaan responden atas pengirim tautan sehingga tautan tidak dibuka.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja sepenuhnya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.9.

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 secara rata-rata telah dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran tahun 2025 sesuai *time schedule*/Rencana Anggaran Kas yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan sasaran dan indikator kinerja utama tersebut Triwulan IV Tahun 2025 tercapai 74,22% (**Sedang**) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025 terealisasi 81,05% dari serapan anggaran total.

Tabel 3.9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran yang disediakan untuk mewujudkan Target Kinerja				Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	C	Efisiensi	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=100% - 9	11=6-9
1	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	0,146 Triliun Rupiah	0,007 Triliun Rupiah	5%	127.070.750	112.973.000,00	88,91%	11%	-6,82%
						44.648.000	5.483.500,00	12,28%	87,72%	
2	Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	2,495 Triliun Rupiah	1,859 Triliun Rupiah	75%	103.763.250	78.899.500,00	76,04%	23,96%	
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86,0	86,67	101%	351.841.792	337.767.600,00	96,00%	4,00%	
						3.812.046.138	3.062.830.816,37	80,35%	19,65%	
Rata-rata					74,22%	4.439.369.930,58	3.597.954.416,37	81,05%	18,95%	

Sumber data : Rekapitulasi Manual dari Penyampaian LKPM Triwulan IV 2025 (data diolah)

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan IV Tahun 2025 seluruh Sasaran Program Belum mencapai target yang telah ditetapkan. Program-program tersebut baik yang telah mencapai target maupun belum mencapai target turut berkontribusi terhadap capaian Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP, dengan capaian Tujuan DPMPTSP sebesar -22,24 Persen. Capaian tersebut ditunjang langsung oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha secara berkelanjutan guna menjamin kegiatan usaha telah dilakukan sesuai standar dan terselesaikannya hambatan-hambatan yang dialami, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Disamping itu ditunjang pula dengan Program Pelayanan Penanaman Modal, dimana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanaman modal yang diterima turut mempengaruhi tingkat kepercayaan penanaman modal untuk berinvestasi di Kabupaten Lumajang, serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang lain yang disediakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%) (Kinerja)	Perhitungan Kinerja	Menunjang Secara Langsung/ Menunjang Secara Tidak Langsung
1	Meningkatnya Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	34%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	85 Persen	2,193 Triliun Rupiah dibagi 2,640 Triliun Rupiah dikali 100%	Menunjang secara langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	16,15 Persen	1050 Penanam Modal Tahun 2025 dikurangi 904 Penanam Modal Tahun 2024 dibagi 904 Penanam Modal Tahun 2024 dikali 100%	Menunjang secara langsung, dengan promosi penanaman modal yang tepat mampu meningkatkan jumlah investasi
3	Meningkatnya Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	88%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	63 Persen	35 Pelaku Usaha yang telah diselesaikan masalahnya dibagi 56 Pelaku Usaha Bermasalah dikali 100%	Menunjang secara langsung, dengan pengendalian yang baik maka tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya dapat meningkatkan capaian realisasi investasi
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	101%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	-21 Persen	16.881 Izin Usaha Yang diterbitkan tahun 2025 dikurangi 21.388 Izin Usaha yang diterbitkan tahun 2024 dibagi 21.388 Izin Usaha yang diterbitkan tahun 2024 dikali 100%	Menunjang secara langsung, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan

Disamping ditunjang dengan Program Utama dan Program Penunjang tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja tersebut ditunjang pula dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Pelayanan Cepat Tanggap (SIAP-SAJI) untuk pelayanan jemput bola terjadwal yang melaksanakan layanan berbantuan izin usaha melalui aplikasi e-Simpadu dan *Online Single Submission* (OSS).
- c. Pelaksanaan kegiatan NGOPI SINI (Monggo Mampir Kami Siap Melayani), pelayanan kolaborasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala DPMPTSP Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	127.070.750,48	112.973.000	88,91%
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.751.750	9.035.000	61,25%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.02. 2.01.000 3	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	11.046.250	9.035.000	81,79%
2.18.02. 2.01.000 4	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3.705.500	-	0,00%
2.18.02. 2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	112.319.000,48	103.938.000	92,54%
2.18.02. 2.02.000 1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.870.000	21.600.000	83,49%
2.18.02. 2.02.000 4	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	86.449.000,48	82.338.000	95,24%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	44.648.000	5.483.500	12,28%
2.18.03. 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	44.648.000	5.483.500	12,28%
2.18.03. 2.01.000 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	44.648.000	5.483.500	12,28%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	103.763.250	78.899.500	76,04%
2.18.05. 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	103.763.250	78.899.500	76,04%
2.18.05. 2.01.000 4	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11.098.750	7.395.000	66,63%
2.18.05. 2.01.000 5	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	59.850.000	59.650.000	99,67%
2.18.05. 2.01.000 6	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	32.814.500	11.854.500	36,13%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	351.841.792	337.767.600	96,00%
2.18.04. 2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	351.841.792	337.767.600	96,00%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.04. 2.01.000 5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.350.000	-	0,00%
2.18.04. 2.01.000 6	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	311.611.792	299.358.000	96,07%
2.18.04. 2.01.000 7	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	7.200.000	6.729.600	93,47%
2.18.04. 2.01.000 8	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	31.680.000	31.680.000	100,00%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.812.046.138,10	3.062.830.816	80,35%
2.18.01. 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.835.000	9.771.750	99,36%
2.18.01. 2.01.000 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.869.750	2.852.500	99,40%
2.18.01. 2.01.000 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	851.000	833.750	97,97%
2.18.01. 2.01.000 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	844.250	827.250	97,99%
2.18.01. 2.01.000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000	294.000	98,00%
2.18.01. 2.01.000 7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.970.000	4.964.250	99,88%
2.18.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.781.915.436	2.182.430.443	78,45%
2.18.01. 2.02.000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.723.413.436	2.131.820.443	78,28%
2.18.01. 2.02.000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.102.000	49.230.000	86,21%
2.18.01. 2.02.000 5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.075.000	1.062.000	98,79%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	325.000	318.000	97,85%
2.18.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	755.000	741.750	98,25%
2.18.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	130.000	123.750	95,19%
2.18.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	625.000	618.000	98,88%
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.670.000	-	0,00%
2.18.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.670.000	-	0,00%
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.426.268	106.558.769	79,86%
2.18.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.403.701	6.219.200	97,12%
2.18.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.983.875	49.511.531	90,05%
2.18.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.318.492	3.005.325	56,51%
2.18.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000	375.000	93,75%
2.18.01.2.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	13.736.200	8.440.000	61,44%
2.18.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.300.000	2.499.500	39,67%
2.18.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.284.000	36.508.213	78,88%
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.116.146	180.224.002	81,14%
2.18.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	222.116.146	180.224.002	81,14%
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.844.320	310.801.510	88,08%
2.18.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	662.500	516.350	77,94%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01. 2.08.000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.970.000	110.196.021	73,48%
2.18.01. 2.08.000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.211.820	200.089.139	98,95%
2.18.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.483.968,10	272.302.592	94,39%
2.18.01. 2.09.000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.314.201	99.772.988	91,27%
2.18.01. 2.09.000 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.499.765,56	35.090.000	98,85%
2.18.01. 2.09.000 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.670.001,54	137.439.604	95,66%
TOTAL		4.439.369.930,58	3.597.954.416,37	81,05%

C. Capaian Kinerja Lainnya

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Lumajang menerima Penghargaan:

1. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dengan predikat Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) Tahun 2024 yang diberikan oleh Pj. Bupati Lumajang pada upacara tanggal 17 Januari 2025.



2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang selaku Penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lumajang dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lumajang pada Rabu tanggal 7 Mei 2025 bertempat di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat melalui MPP.



3. Menerima Penghargaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terbaik dari BAZNAS Kabupaten Lumajang yang diberikan oleh Bupati Lumajang pada hari Kamis 25 September 2025 bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kinerja ini memuat hasil yang dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025, capaian kinerja belum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra PD 2025-2029 dan Renja PD Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja. Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang termasuk dalam kategori **Sedang** dengan capaian kinerja rata-rata 74,22%, dalam perjalanannya terdapat pula permasalahan dan hambatan yang harus ditanggulangi dan ditingkatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Hambatan yang dihadapi dan rencana dalam perbaikannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

No	Hambatan	Rencana Langkah Strategis
1	Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi	Optimalisasi promosi peluang investasi berfokus pada sektor unggulan.
2	Belum memadainya kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal	a. Melaksanakan reviu atas kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal; b. Meningkatkan sosialisasi dan penawaran kepada pelaku usaha dan calon penanam modal baru.
3	Tingkat pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM	a. Meningkatkan publikasi tentang LKPM pada seluruh media publikasi yang

No	Hambatan	Rencana Langkah Strategis
		dimiliki oleh DPMPTSP; b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM.
4	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan penanaman modal	a. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pegawai DPMPTSP; b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait pelayanan <i>online</i> terintegrasi; c. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi pada seluruh media publikasi yang dimiliki oleh DPMPTSP.
6	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pelayanan dan menganggarkan kembali pada dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, saran dan kiritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya. Semoga dengan disusunnya laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 6 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

LAMPIRAN

Pelayanan SIAP SAJI ke Desa



DILARANG MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN



GRATIS
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

siap saji
AKSI PELAYANAN PERIZINAN LANGSUNG JADI NIB
NOMOR INDUK BERUSAHA



SETOR MADU KECAMATAN SUMBERSUKO NIB KUNCI LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN USAHA SEKALIGUS PINTU AKSES BERBAGAI PROGRAM PEMERINTAH, KEMUDAHAN PERIZINAN DAN PELUANG MODAL

STOP

GRATIFIKASI



www.dpmp t sp . lumajangkab . go . id
Dpmp t sp Lumajangkab
Dpmp t sp Lumajang
dpmp t sp _ kab _ lumajang
mpp . lumajangkab . go . id
mpp _ lumajang
Layanan Informasi Dan Pengaduan
WA. 0811-328-6464 email : pengaduan.dpmp t sp @ lumajangkab . go . id
#bangga melayani bangsa



SETOR MADU KECAMATAN PADANG MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK LINTAS OPD LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT



HADIR DI SETOR MADU 21 KECAMATAN

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

AKSI PELAYANAN PERIZINAN LANGSUNG JADI NIB
NOMOR INDUK BERUSAHA



siap saji **STOP**
GRATIFIKASI

DILARANG MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN



www.dpmp t sp . lumajangkab . go . id
Dpmp t sp Lumajangkab
Dpmp t sp Lumajang
dpmp t sp _ kab _ lumajang
mpp . lumajangkab . go . id
mpp _ lumajang
Layanan Informasi Dan Pengaduan
WA. 0811-328-6464 email : pengaduan.dpmp t sp @ lumajangkab . go . id
#bangga melayani bangsa

Kegiatan Business Meeting



Rapat Tim Percepatan Investasi



Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha




Kegiatan Pemantauan Permohonan Izin dan Non Izin



Tangkap Layar Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS)


ABDUL MUNIR, AMK, SPI



BERANDA PELAPORAN PENGADUAN PENCABUTAN SANKSI PENGADWALAN PROFILE

1	17-05-2025	LK4174883 - KONSTRUKSI (Triwulan I 2025)	(PMDN) NIB:	Perizinan Berusaha: NIB: Nomor Kegiatan Usaha: KBL: 46315 Lokasi Proyek: Alamat: Jalan Lingkar Timur Dusun Pajasan Kelurahan Sumberajo Kecamatan Sukodono (3508) Kab/Kota Kab. Lumajang Provinsi: Jawa Timur Proyek Inline: Tidak Tingkat Risiko: Rendah Status SS: NIB Terbit	Modal Tetap: 0 Modal Kerja: 45.000.000.000 Total Rencana: 45.000.000.000	TKI: 5 TKA: 0 Total: 5	Modal Tetap: 20.795.000.000 Modal Kerja: 45.000.000.000 Total: 65.795.000.000	TKI: 0 TKA: 0	Detail LKPM Riwayat	LIHAT CETAK KIRIM EMAIL RIWAYAT
---	------------	--	-------------	--	---	---	--	--------------------------------	--	--

ABDUL MUNIR, AMK, SPI



BERANDA PELAPORAN PENGADUAN PENCABUTAN SANKSI PENGADWALAN PROFILE

7	02-07-2025	LK4803441 - PRODUKSI (Triwulan II 2025)	(PMDN) NIB:	Perizinan Berusaha: NIB: Nomor Kegiatan Usaha: KBL: 45401 Lokasi Proyek: Alamat: JL. DR. SOETOMO NO.72 Kelurahan Tompikensari Kecamatan Lumajang (3508) Kab/Kota Kab. Lumajang Provinsi: Jawa Timur Proyek Inline: Tidak Tingkat Risiko: Rendah Status SS: NIB Terbit	Modal Tetap: 4.000.000.000 Modal Kerja: 1.250.000.000 Total Rencana: 5.250.000.000	TKI: 3 TKA: 0 Total: 3	Modal Tetap: 4.000.000.000 Modal Kerja: 0 Total: 4.000.000.000	TKI: 0 TKA: 0	Detail LKPM Riwayat	LIHAT CETAK KIRIM EMAIL RIWAYAT
---	------------	---	-------------	---	---	---	---	--------------------------------	--	--



- BERANDA
- PELAPORAN
- PENGADUAN
- PENCABUTAN
- SANKSI
- PENJADWALAN
- PROFILE

01-07-2025
 LKAB48219 - KONSTRUKSI (Trawulan II 2025)

(PMDN)
 NIB:

Perizinan Berusaha:
 NIB:

Nomor Kegiatan Usaha:

KBLI:
 4791

Lokasi Proyek:

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto
 Kelurahan : Tompokensan
 Kecamatan : Lumajang
 (3508) Kab/Kota : Kab. Lumajang
 Provinsi : Jawa Timur

Proyek Inline:
 Tidak

Tingkat Risiko:
 Rendah

Status SS:
 NIB Terbit

Modal Tetap:
 2.000.000.000
Modal Kerja:
 12.000.000.000
Total Rencana:
 14.000.000.000

TKI:
 15
TKA:
 0
Total:
 15

Modal Tetap:
 10.650.000.000
Modal Kerja:
 0
Total:
 10.650.000.000

[Rincian Rp.214](#)

- Lihat
- Cetak LK
- Kirim Email
- Berkas